

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto. Hukum dan Perkembangan Hukum. Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum. Adam Podgorecci dan Christoper J. Whelan. eds (Jakarta: Sinar harapan. 1988).
- A Pangerang Moenta, 2016, *Permusyawaratan dan DPRD (Analisis Aspek Hukum dan Produk Permusyawaratan)*. Inteligencia Media. Malang.
- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum. Edisi Kedua*. Cet. II. PT. Fajar Interpratama Mandiri. Jakarta. 2017.
- Ahmad Qurtubi. 2019. *Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori dan Implementasi)*. CV Jakad Media Publishing. Surabaya. hlm.
- Aminuddin Ilmar. 2014. *Membangun Negara Hukum Indonesia*. Phinatama Media. Makassar.
- Amran Suadi. 2014. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*. PT Raja Grafindo. Jakarta.
- Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana. 2018. *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih. 2018. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Media Pressindo. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya .
- Baso Madiung. 2017. *Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*. Celebes Media Perkasa. Makassar.
- Dahwadin dan Hasanudin. 2020. *Pengadilan Agama di Indonesia*. CV Mangku Bumi Media. Jawa Tengah.
- Darmawan Napitupulu. dkk. 2020. *E-Government: Implementasi. Strategi dan Inovasi*. Yayasan Kita Menulis. \_\_\_\_\_.
- Dito Aditia Darma Nasution. 2019. *Akuntansi Sektor Publik*. Uwais Inspirasi Indonesia. Sidoarjo.

- Fakhry Zamzam. 2015. Good Governance Sekerteriat DPRD. Deepublish. Yogyakarta. Muhammad Ridha Albaar. 2020. Implementasi E-Government dalam menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih. CV Synax Computama. Cirebon.
- Herlambang Rahmadani. 2020. Collaborative Governance Dalam Penyediaan Infrastruktur. Deepublish. Yogyakarta.
- Hernimawati. 2018. Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame. CV Jakad Publishing. Surabaya.
- Jazim Hamidi. et.al. 2012. Teori dan Hukum Perencanaan Perda. UB Press. Malang.
- Jum Angrgriani. 2011. Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah. Universitas Tama Jagakarsa. Jakarta.
- Khotibul Umam. 2020. Dewan Pengawas Syariah. Teori dan Praktik Pengawasan Kepatuhan Syariah di Indonesia. Duta Media Publishing. Makassar.
- Kristian. 2017. Kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap Constitutional Complaint Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. An1mage. Tangerang.
- M Jefri Arlinandes Chandra & JT Pareke. 2018. Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Di Indonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. CV Zigie Utama. Bengkulu.
- Markus Gunawan. 2008. Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Legislatif (DPR, DPRD, dan DPD). Visimedia. Jakarta Selatan.
- Mohamad Khomim. 2021. Peran DPRD dalam Mewujudkan Good Governance di Daerah. PT Nasya Expanding Management. Jawa Tengah.
- Muhammad Anwar. 2020. Pengantar Dasar Ilmu Manajemen. Kencana. Jakarta.
- Nurkholis dan Moh. Khusaini. 2019. Penganggaran Sektor Publik. UB Press. Malang.
- Phaureula Artha Wulandari. 2018. Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah. Deepublish. Yogyakarta.
- Rheza Pratama. 2020. Pengantar Manajemen. Deepublish. Yogyakarta.

- Rispa Ngindana dan Imam Hanafi. 2012. APBD Partisipatif: Sebuah Harapan yang Terabaikan. UB Press. Malang.
- Saiful Anwar. 2004. Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara. Glora Madani Press. Jakarta.
- Saiful Anwar. 2004. Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara. Glora Madani Press. Jakarta.
- Salim.H.S dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi. Jakarta. Rajawali Press.
- Siti Amina. 2016. Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal. Kencana. Jakarta.
- Sobirin. 2013. Empat Tahun Perjalanan Wakil Rakyat Kota Makassar. CV Sah Media. Makassar.
- Soerjono Soekanto. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sri Pudyatmoko. 2009. Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan. Grasindo. Jakarta.
- Sugianto. \_\_\_\_\_. Pajak dan Retribusi Daerah. Grasindo. Jakarta.
- Sukarna. 2011. Dasar-Dasar Manajemen. CV Mandar Maju. Bandung.
- Tim MGMP Pati. 2015. Administrasi Farmasi Jilid 1. Deepublish. Yogyakarta.
- Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo. 2011. Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia. Kencana. Jakarta.
- Victor Imanuel W. Nalle. Ilmu Perundang-Undangan. Suluh Media. Yogyakarta. 2017.
- Widodo Suryandono. 2017. Tenaga Kerja Asing: Analisis Politik Hukum. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Wiwiek Prihandina. 2020. Korupsi APBD: Sebuah Meta Analisis. Deepublish. Yogyakarta.
- Yaya Ruyatnasih dan Liya Megawati. 2018. Pengantar Manajemen. CV Absolute Media. Yogyakarta.
- Yulia A. Hasan. 2020. Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia. Kencana. Jakarta Timur.

Zulkifli Aspan. 2013. Kapita Selekta Ilmu Hukum. Membumi Publishing. Makassar.

### **Jurnal Ilmiah. Tesis. Skripsi**

Achmad Ruslan. 2013. Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Jurnal Ilmu Hukum Amannagappa Vol. 21 Nomor 1.

Aprianto L. Kuddy. "Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Kinerja Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Pemoderating". Jurnal Manajemen dan Bisnis. Volume 1 Nomor 1. (Januari 2017).

Hugo Martinus Karubaba. Wahyu Hidayat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Nabire). [https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail\\_pencarian/55574#:text=pengawasan%20anggaran%20\(APBD\)%20merupakan%20suatu.dan%20ketentuan%20ketentuan%20yang%20berlaku](https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/55574#:text=pengawasan%20anggaran%20(APBD)%20merupakan%20suatu.dan%20ketentuan%20ketentuan%20yang%20berlaku) (diakses pada 6 februari 2021. pukul 23.57)

Juharni. "Model Pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah di Kabupaten Sinjai". Jurnal Administreare. Volume 3 Noomor 1 (2016).

Moh. Iqbal Babeng. Andi Pangerang Moenta. Hamzah Halim. 2018. Efektivitas Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai. Jurnal IUS. Vol VI. Nomor 1.

Serafica Gischa. Keuangan Daerah: Pengertian. Sumber dan Prinsipnya <https://www.kompas.com/skola/read/2020/09/17/120000969/keuangan-daerah-pengertian-sumber-dan-perinsipnya> (diakses pada 6 februari 2021. pukul 23.30).

### **Peraturan Perundang-Perundangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020 menyatakan bahwa penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021

Peraturan DPRD Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib

Peraturan DPRD Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kota Makassar Nomor 1 Tahun tentang Tata Tertib

### **Internet**

Bpkp.go.id. Good Governance Mensyaratkan Adanya Pengawasan diluar organisasi yang Bersangkutan. diakses pada tanggal 10 juni 2021. <http://www.bpkp.go.id/berita/read/113/8530/JB.-SUMARLIN-Good-Governance>.

DPRD Kota Makassar. <http://dprd-makassarkota.go.id/>

Hanief Syafi. Tujuan dan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah. <https://blog.klikcair.com/tujuan-dan-prinsip-pengelolaan-keuangan-daerah/> (diakses pada 6 februari 2021. pukul 23.45)

Kompas.com. Tidak Serius Tangani Covid-19 DPRD tolak APBD Perubahan Pemkot Makassar. Diakses pada tanggal 3 April 2021 <https://regional.kompas.com/read/2020/10/02/17505721/tak-serius-tangani-covid19-dprd-tolak-apbd-perubahan-pemkot-makassar>

Parlemen Indonesia. <http://parlemenindonesia.org/fungsi-dpr/pengawasan/rdp-rdpu/>

Suarasulsel.id. Penggunaan anggaran penanganan covid-19 kota makassar tidak transparan. Diakses pada tanggal 3 April 2021 <https://sulsel.suara.com/read/2020/10/05/050032/penggunaan-anggaran-penanganan-covid-19-kota-makassar-tidak-transparan?page=all>

Wikipedia.org. Pemerintahan Daerah di Indonesia. [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan\\_daerah\\_di\\_indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_indonesia) (diakses pada 6 februari 2021. pukul 23.08).

Yunis Herlina. 2016. Kuliah Online LKPD Pengelolaan Keuangan Daerah. UPT Pengembangan Pengelolaan Keuangan. <https://youtu.be/JEuz38gh41E>

# LAMPIRAN



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111  
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867  
Email : [Kesbang@makassar.go.id](mailto:Kesbang@makassar.go.id) Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 21 Maret 2022

**K e p a d a**

**Yth. SEKRETARIS DPRD**  
**KOTA MAKASSAR**

**Di –**  
**MAKASSAR**

**SURAT IZIN PENELITIAN**

**Nomor : 070/519 -II/BKBP/III/2022**

- Dasar** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).
- Memperhatikan** : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor **28400/S.01/PTSP/2022**, Tanggal 21 Maret 2022 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya Kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada :

**Nama** : **ERNITA RAHMADHANI BYM**  
**NIM / Jurusan** : B012182052 / Ilmu Hukum/Tata Negara  
**Pekerjaan** : Mahasiswa (S2) UNHAS  
**Tanggal pelaksanaan:** **21 Maret s/d 21 April 2022**  
**Jenis Penelitian** : Tesis  
**Alamat** : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar  
**Judul** : **"SISTEM PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KOTA MAKASSAR"**

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui Email [Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com](mailto:Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com).

a.n. WALIKOTA MAKASSAR  
KEPALA BADAN KESBANGPOL.  
u.b.  
SEKERTARIS,



**DR. HARI, S.IP., S.H., M.H., M.Si**  
Pangkat : Pembina Tingkat I/IV.b  
NIP. : 19730607 199311 1 001

**Tembusan :**

1. Walikota Makassar di Makassar (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (sebagai laporan);
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
5. Dekan PPs Fak. Hukum UNHAS Makassar di Makassar;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip.